

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR****UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS PRUWITANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
3. NHK : **923549**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 278.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m²/120 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m²/27 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. Tanah Seluas 724 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 77 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 59.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA/C100 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA GL15B1DFMT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA D1BO2N122 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOBIL, SUZUKI CARRY/ST100 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 17.750.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 43.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 397.750.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 397.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.